

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017-2021**

Elisa Olandari¹, Anis Feblin², Eka Meiliya Dona³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

Elisaolandari212@gmail.com¹, feblinfathullah@gmail.com²,

lia.meliyadona@gmail.com³

ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effect of Regional financial performance on Capital Expenditure in South Sumatra Province in 2017-2021. The method used is Non Probability Sampling, namely Purposive Sampling which was carried out in 17 Regencies/Cities, using a quantitative approach and the data source used is secondary data. The total data is 85 Realization Reports of District/City APBD of South Sumatra Province. The analysis technique uses multiple linear regression analysis with hypothesis testing, namely partial statistical tests (*t* test) and simultaneous (*F* test). The results of this study indicate that partially the degree of decentralization, the effectiveness of PAD and efficiency affect capital expenditure, where the calculated *t* value is greater than the *t* table value. The results of the *F* test show a sig value of $0.000 < 0.05$ or the calculated *F* value of $9.092 > F$ table 2.72 which means that together the degree of decentralization (*X*₁), the effectiveness of PAD (*X*₂) and efficiency (*X*₃) have a significant effect on spending capital in the Regency/City of South Sumatra Province. The contribution of the local government in this study has been quite good in terms of implementing the degree of decentralization and regional financial efficiency, while the realization of regional government PAD is still not good enough so that there is a need for an increase in the effectiveness of regional own-source revenue.*

Keywords: *Capital Expenditure, Decentralization Degree, PAD Effectiveness and Efficiency*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah, mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah dan mengatur keuangan (Nurhasana dkk, 2022). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 menjelaskan otonomi

daerah akan berhasil, jika didukung oleh kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tertib, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab atau memenuhi konsep nilai uang (*Value for money*) dan penerapan prinsip tata kelola

pemerintah yang baik (Indiyanti dan Rahyuda, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan nasib suatu daerah karena semakin banyak potensi-potensi ekonomi yang digali oleh pemerintah daerah maka semakin banyak pula sumber keuangan yang didapat sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah (Monalisa, 2019). Kemampuan daerah dalam mengelolah keuangan daerah dan potensi daerahnya diharapkan mampu mewujudkan daerah yang mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat. Keuangan daerah terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisah. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kusufi dan Halim, 2014:28).

Menurut Mamesah (dikutip di Halim, 2017:12) APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintahan, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek

daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang di maksud. Selisih antara anggaran dan pendapatan daerah dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit APBD. Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali dan kearah mana belanja daerah di fokuskan atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai (Hidayat dan Maski, 2013).

Kinerja keuangan pemerintahan daerah merupakan peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu priode anggaran. Menurut Halim (dikutip di Putra, 2022:60) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan

pemerintah daerah dengan analisis rasio. Hasil analisis rasio tersebut nantinya menjadi tolak ukur suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Indikator yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD dan efisiensi keuangan Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Menurut penelitian Indiyanti dan Rahyuda (2018) dan Praza (2016) menemukan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Nurhasana dkk, (2022) dan Tamawiwiy dkk, (2018) menemukan Variabel Desentralisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah di rencanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Penelitian Tamawiwiy dkk, (2018) menemukan rasio Efektivitas

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Indiyanti dan Rahyuda, (2018) menemukan rasio Efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian Nurhasana dkk, (2022) rasio Efektivitas PAD tidak memiliki hubungan /berpengaruh terhadap belanja modal.

Rasio Efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan besarnya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima menurut Halim (dikutip di indiyanti dan Rahyuda, 2018). Menurut Nurhasana dkk, (2022) dan Rinta dkk, (2019) Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian Tamawiwiy dkk, (2018) rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap belanja modal dan tidak signifikan.

Berikut ini adalah data mengenai Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Dalam Rupiah)

TA	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
2017	Pendapatan daerah	8.195.110.542.121	8.195.968.231.800	100
	Belanja Daerah	6.844.917.482.007	6.409.382.404.458	94
	Surplus	1.350.193.060.114	1.786.585.827.342	132,3
2018	Pendapatan daerah	6.865.580.106.642	2.275.791.288.458	33
	Belanja Daerah	5.806.808.072.333	7.941.143.670.102	137
	Defisit	1.058.772.034.309	5.665.352.381.644	535,0
2019	Pendapatan daerah	9.660.923.645.962	9.280.742.072.449	96
	Belanja Daerah	9.713.473.244.482	9.618.074.513.841	99
	Defisit	52.549.598.520	337.332.441.392	641,9
2020	Pendapatan daerah	10.355.399.024.137	9.278.520.060.062,03	89,6
	Belanja Daerah	10.541.651.134.823	9.517.763.493.965,86	90
	Defisit	186.252.110.686	239.243.433.903,83	128,4
2021	Pendapatan daerah	10.205.021.421.649,00	9.611.291.244.667	94
	Belanja Daerah	10.729.096.013.693,00	10.060.730.260.978	93,7
	Defisit	524.074.592.044,00	449.439.016.311	85,7

Sumber : www.djpk.kemenkue.go.id

Sementara untuk data anggaran dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Dalam Rupiah)

Ket	Tahun	Anggaran	Realisasi	Surplus/ Selisih	%
Belanja Modal	2017	1.768.324.028.745	1.377.382.678.424	390.941.350.321	77,89% ▼
	2018	843.255.047.139	1.537.275.105.768	-694.020.058.629	1,82% ▲
	2019	1.610.369.313.953	1.606.219.507.432	4.149.806.521	99,70% ▼
	2020	2.222.333.311.498	1.664.700.767.363	557.632.544.135	74,91% ▼
	2021	1.954.317.418.862	1.836.834.114.021	117.483.304.841	93,99 ▼

Sumber : www.djpk.kemenkue.go.id

Berdasarkan uraian latar belakang maka penelitian ini membahas apakah terdapat pengaruh antara kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal dan dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkatkan proporsi untuk belanja

modal. Dengan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017–2021?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
3. Untuk mengetahui Pengaruh Efisiensi keuangan daerah terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
4. Untuk mengetahui pengaruh Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD dan Efisiensi terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017–2021?

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu gambaran mengenai tingkat

pencapaian suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertulis dalam rencana strategi suatu organisasi. Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan system keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan (Sulistyowati dan Fidiana, 2017).

Menurut Wahyuni dan Rosmida (2016) Kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode, Permandagri Nomor 13 Tahun 2006 (dikutip di Putra, 2022:45) menyebutkan bahwa kinerja adalah kelurahan/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas-kualitas yang terukur.

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Putra (2022:60) ada beberapa cara dalam pengukuran kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan yaitu Rasio pertumbuhan, rasio kemandirian keuangan daerah, Derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio aktivitas, efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Namun di penelitian ini hanya menggunakan rasio derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah.

a. Derajat Desentralisasi

Menurut Daling (dikutip di Putri dan Rahayu, 2019) derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pengukuran ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah (Putra, 2022:62).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah semakin baik (Putra, 2022:65).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

c. Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Putra, 2022:64).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang

dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan efektif (Halim 2017:214).

Manurut Erlina dan Rasdianto (2015:155) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Seperti Perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud.

Jenis Belanja Modal

Menurut Halim (2017:213) belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:

- a. Belanja modal tanah
Yaitu seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
Yaitu seluruh pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
- c. Belanja modal gedung dan bangun
Yaitu seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.

- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Yaitu seluruh pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi.

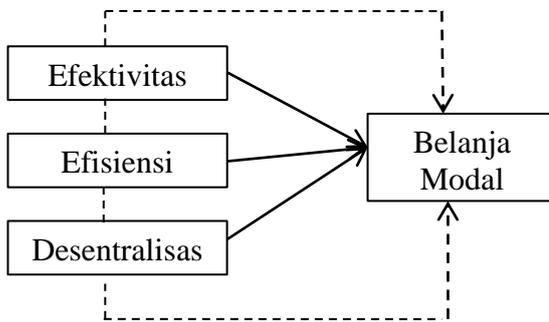
- e. Belanja modal fisik lainnya

Yaitu seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Belanja modal non fisik seperti antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembangunan barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak dan pengadaan buku-buku.

Kerangka Pemikiran

Ilustrasi dari penelitian ini tergambar pada kerangka pemikiran, dimana belanja modal merupakan variabel independen sementara derajat desentralisasi (X_1),

efektivitas PAD (X_2) dan efisiensi keuangan daerah (X_3).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Parsial
- - - -> : Simultan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 17 Kabupaten/Kota, yaitu terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota, data yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD, dengan ruang lingkup pembahasan yaitu untuk mengetahui pengaruh Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD dan Efisiensi keuangan Daerah Terhadap belanja modal Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif selama 2017-

2021, dengan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan melalui Website www.djpk.kemenkue.go.id.

. Populasi dalam penelitian ini adalah 85 Laporan Realisasi APBD dari 17 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017-2021 yaitu terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Dan penelitian ini menggunakan teknik total *sampling*, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, sebagai berikut:

Tabel 3. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Pusat Pemerintahan
1	Pagar Alam	Pagar Alam
2	Palembang	Palembang
3	Prabumulih	Prabumulih
4	Kab. Empat Lawang	Tebing Tinggi
5	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Talang Ubi
6	Kab. Musi Banyuasin	Sekayu
7	Musi Rawa Utara	Rupit
8	Banyuasin	Pangkal Balai
9	Ogan Komering Ulu selatan	Muaradua
10	Muara Enim	Muara Enim
11	Musi Rawas	Muara Beliti
12	Ogan komering ulu timur	Martapura
13	Lahat	Lahat
14	Ogan komering ilir	Kayu Agung
15	Ogan ilir	Indralaya
16	Ogan komering ulu	Baturaja
17	Lubuk linggau	Lubuk Linggau

Sumber : www.djpk.kemenkue.go.id

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	85	25.25	27.74	26.6318	.50219
Derajat Desentralisai	85	2.67	31.94	8.6819	5.72174
Efektivitas PAD	85	.27	2.12	.9931	.34609
Efisiensi	85	.74	1.15	.9809	.06170
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data diolah, 2022

Terlihat pada table 4, hasil analisis sebagai berikut:

- a. Hasil analisis deskriptif variabel derajat desentralisasi (X_1) memiliki nilai terendah 2,67 pada tahun 2021 yaitu Kab. Empat Lawang dan tertinggi senilai 31,94 di Kota Palembang pada tahun 2017, nilai rata-rata 8,688.19 dengan standar deviasi sebesar 5,721.74. maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai deviasi, sehingga kualitas data dari variabel derajat desentralisasi baik dan penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.
- b. Hasil analisis efektivitas PAD (X_2) menunjukkan bahwa nilai terendah 0,27 yaitu pada tahun 2021 Kabupaten Banyuasin . Nilai tertinggi sebesar 2,12 yaitu Kab OKU pada tahun 2017. Nilai rata-rata dari seluruh data

Efektivitas sebesar 99,31 . maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan kualitas data dari variabel derajat desentralisasi dan penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

- c. Hasil analisis efisiensi (X_3) menunjukkan bahwa nilai terendah 0,74 pada tahun 2021 di Kabupaten Penungkalan Abab Lematang dan tertinggi senilai 1,15 pada tahun 2021 di Kabupaten Banyuasin. Nilai rata-rata sebesar 98,09 sedangkan standar deviasi 061,728. maka dapat disimpulkan bahwa mean lebih besar dari pada standar deviasi.
- d. Hasil deskriptif pada belanja modal (Y) nilai minimum 25,25 di Kota Pagar Alam pada tahun 2018 dan nilai maksimum yaitu

27,74 pada tahun 2019 di kota Palembang. Sedangkan rata-rata 26,6318 lebih besar dari standar deviasi, sehingga

mengidentifikasi kualitas data dari variabel belanja modal baik dan penyebaran data menunjukkan hasil normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.002	.814		29.489	.000
Derajat Desentralisai	.037	.008	.424	4.400	.000
Efektivitas PAD	-.042	.141	-.029	-.302	.764
Efisiensi	2.395	.791	.294	3.029	.003

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah, 2022

Terlihat pada tabel *coefficients* hasil persamaan regresi yaitu:

$$Y=24,002+0,037X_1+(-0,042X_2)+0,2395X_3$$

Interpretasi sebagai berikut:

- a. Konstanta bernilai 24,002 menunjukkan bahwa jika derajat desentralisasi (X₁) dan efektivitas PAD(X₂) dan efisiensi (X₃) bernilai nol maka belanja modal (Y) sebesar 24,002
- b. Koefisiensi regresi derajat desentralisasi (X₁) bernilai positif sebesar 0,037 artinya jika penganggaran derajat desentralisasi (X₁) mengalami kenaikan, maka belanja modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,037

- dengan asumsi variabel efektivitas (X₂) tidak berubah/tetap.
- c. Koefisien efektivitas PAD (X₂) bernilai negatif sebesar -0,042 artinya jika penganggaran efektivitas PAD (X₁) mengalami penurunan, maka belanja modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,042 dengan asumsi variabel efektivitas (X₃) tidak berubah/tetap.
- d. Koefisien efisiensi (X₃) bernilai positif sebesar 2,395 artinya jika penganggaran

efisiensi (X_3) mengalami kenaikan, maka belanja modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 2,395 dengan asumsi derajat desentralisasi (X_1) tidak berubah/tetap.

a. Uji Hipotesis

Uji Parsial (uji t)

Untuk pengujian hipotesis secara parsial terlihat pada tabel 5 *coefficients* kolom T, dimana besarnya tingkat signifikan (α) yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Untuk Derajat Desentralisasi (X_1) Di peroleh nilai t_{hitung} sebesar 4,400,

Uji Simultan (uji F)

kemudian nilai t_{tabel} dicari dengan $df=n-k-1=85-3-1=81$ didapat sebesar 1,989. Maka H_0 di tolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh derajat desentralisasi (X_1) terhadap Belanja Modal (Y). Efektifitas PAD nilai t_{hitung} sebesar -302 dan t_{tabel} 1,989, maka H_0 terima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh efektivitas PAD (X_2) terhadap belanja modal (Y). Efisiensi sebesar 3,029, kemudian nilai t_{tabel} sebesar 1,989. maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh efisiensi (X_3) terhadap belanja modal (Y).

Tabel 6. Anova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.336	3	1.779	9.092	.000 ^a
Residual	15.848	81	.196		
Total	21.184	84			

a. Predictors: (Constant), Efisiensi , Derajat Desentralisai, Efektivitas PAD

a. Dependent Variable: Belanja M

b. Odal

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan terlihat pada tabel 6 nilai signifikan untuk pengaruh derajat desentralisasi (X_1), efektivitas PAD (X_2) dan efisiensi

(X_3) terhadap belanja modal (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 9,092 >$ nilai $F_{tabel} 2,72$. Hal tersebut

membuktikan bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima.



Gambar 2
Uji F Tingkat Keyakinan 95%

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 7. Model Summary^b

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.502 ^a	.252	.224	.44232	1.789

a. Predictors: (Constant), Efisiensi, Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah, 2022

Terlihat pada tabel 7 diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,224 dapat dikatakan bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen terhadap dependen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 22,4 % sedangkan sisinya 88,6% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti pertumbuhan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Derajat Desentralisasi secara Parsial terhadap Belanja Modal

Hasil analisis yang dilakukan pengujian derajat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal. Derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolah pendapatan. Semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Indiyanti dan Rahyuda (2018) dan Praza (2016) menemukan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Nurhasana dkk, (2022) Julius dkk, (2018) menemukan Variabel Desentralisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Efektivitas PAD secara Parsial terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis pengujian menunjukkan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang di targetkan berdasarkan potensi nyata daerah (Putra, 2022:63). Anggaran yang sudah di buat dalam priode tertentu seharusnya di alokasikan dengan tepat untuk kebutuhan daerah yang tepat sehingga pemerintah dapat melakukan belanja modal yang sesuai dengan yang sudah di anggarkan (Oktaviatnti dan idayati, 2020). Semakin tinggi peningkatan efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintahan dalam merealisasikan PAD di daerah

tersebut. Namun dalam penelitian ini tingkat efektivitas yang meningkat tidak mempengaruhi tingkat belanja modal.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurhasana dkk, (2022) menemukan rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Arza dan Arif (2017) menemukan rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun berbeda dengan penelitian Yanto dkk, (2015) rasio Efektivitas PAD memiliki hubungan / berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah secara Parsial terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis pengujian variabel Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi penerimaan daerah (Putra, 2022:64). Rasio efisiensi dapat merealisasikan pendapatan serta penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan (Oktavianti dan idayati, 2020). Semakin kecil nilai rasio efisiensi

pengelolaan keuangan maka semakin tinggi pula belanja modal yang akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan salah satu penelitian Nurhasana dkk, (2022) dan Rinta dan sri (2019) Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian Julius dkk, (2018) rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap belanja modal dan tidak signifikan. Namun berbeda dengan penelitian satria, (2021) yang menyatakan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini karena beberapa sampel dan periode waktu yang digunakan

Pengaruh Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan Daerah secara Simultan terhadap Belanja Modal

Hasil analisis pengujian bahwa derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Derajat desentralisasi merupakan mengukur besarnya campur tangan pemerintah pusat serta kemampuan pemerintah

daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Semakin terdesentralisasi suatu daerah menunjukkan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola perekonomian daerahnya sehingga membuat pemerintah lebih leluas untuk menentukan dan meningkatkan pembangunan daerah yang tercermin dalam belanja modal. Selanjutnya efektivitas PAD yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menyerap PAD semakin tinggi kinerja dan penyerapan PAD daerah tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pula pengeluaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya efisien PAD yang mencerminkan efisiensi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas besarnya PAD yang didapat. Semakin tinggi rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk dalam pengeluaran yang boros, sehingga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang digunakan pemerintah sebagai pengeluaran belanja modal yang cenderung lebih kecil.

Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen atau analisis untuk menetapkan besarnya variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, Derajat Desentralisasi dan variabel lain dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 22,4% terhadap variabel yang berkaitan dengan belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Anggaran juga dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja eksekutif organisasi sektor publik (Melia & Sari, 2019). Menurut Setiawan (2019) Studi ini mengklaim bahwa belanja modal dipengaruhi oleh derajat desentralisasi. Hasil penelitian Anggaran juga dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja eksekutif organisasi sektor publik (Melia & Sari, 2019). Menurut Setiawan (2019) Studi ini mengklaim bahwa belanja modal dipengaruhi oleh derajat desentralisasi. Hasil penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara parsial (uji t) kinerja keuangan yaitu derajat desentralisasi (X_1) dan efisiensi keuangan daerah (X_3) berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan untuk Efektivitas PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, ini menunjukkan dalam merealisasikan PAD pemerintahan daerah masih kurang baik sehingga perlunya peningkatan dalam efektivitas pendapatan asli daerah.
2. Secara simultan Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD dan Efisiensi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat hasil analisis pada tabel diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh derajat desentralisasi (X_1), efektivitas PAD (X_2) dan efisiensi (X_3) terhadap belanja modal (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 9,092 > \text{nilai } F_{tabel} 2,72$.
3. Hasil koefisien determinasi Adjusted R-Square 0,224 artinya

kontribusi atau besarnya pengaruh variabel independen yaitu derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah terhadap variabel dependen yaitu belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebesar 22,4% sedangkan sisanya 77,6 ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio pertumbuhan keuangan daerah.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih rendah dalam mempengaruhi belanja modal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus lebih berusaha lagi dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang sudah direncanakan dengan cara peningkatan efektivitas PAD. Evaluasi capaian aucomer biasa juga dilakukan untuk melihat

perubahan-perubahan pada tahun berjalan.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lainnya dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pengukuran lain seperti Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan keuangan daerah, rasio aktivitas, kemandirian keuangan daerah dan rasio lainnya. Penelitian ini hanya menggunakan sampel daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan dalam 5 (lima) tahun, maka untuk penelitian berikutnya agar menambah tahun penelitian.

DAFTAR PUATAKA

- Arif, M, dan Fefri Indra Arza. 2019. Analisis Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(1): 35–49.
- Bastia, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik*. 3 ed. ed. Erlangga. ypkjakarta.

- Bisma, dan Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007.”*Ganec Swara* 4(3): 75–86.
- Erlina, Rasdianto., Omar. 2015. *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. 1 ed. ed. Salemba Empat. jakarta selatan.
- Halim., Abdul 2017. *Manajemen keuangan sektor publik*. ed. Salemba Empat. jakarta.
- Halim, kusufi dan. 2014. *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. 4 ed. ed. Salemba Empat. jakarta selatan.
- Hidayat, Mohammad Fajar, dan Ghozali Maski. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur) *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* 1(2): 1–19.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/580>.
- Inapty, Biana Adha et al. 2017. 17 Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia *Analisis Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Kota Semarang*.
- Indiyanti, Ni Made Deni, dan Henny Rahyuda. 2018. “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7(9): 4713.
- Kuchlis dkk, Hantono. 2021. *akuntansi sektor publik*. ed. media sains Indonesia. bandung-jawa barat.
- Madjid, Jamaludin. 2019. Yogyakarta *Akuntansi Sekor Publik*.
http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx.
- Mardiasmo. 2018. *akuntansi sektor publik*. terbaru. ed. ANDI. yogyakarta.
- Martini, Kadek, dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10(2): 426–43.
- Monalisa, Anshor Wibowo dan. 2019. “Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah

- Sebagai Variabel Intervening.” 3(2): 212–25.
- Nurhasana, Annisa. 2022. 4 *pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota provinsi Sumatera selatan.*
- Oktavianti, Yusri Alawiyah. 2020. “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(11): 1–20.
- Pemerintahan, Standar Akuntansi, Berbasis Akrua, Komite Standar, dan Akuntansi Pemerintahan. 2008. “Laporan realisasi anggaran.” (02).
- Praza, Eko Indra. 2016. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4(1): 25–36.
- Priyatno, Duwi. 2017. *panduan praktis olah data menggunakan spss.* ed. ANDI. yogyakarta.
- Putra, Windhu. 2022. *tata kelolaan ekonomi keuangan daerah.* 1 ed. ed. Rajawali Pers. depok.
- Putri, Rinta Seftyawati, dan Sri Rahayu. 2019. “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)* 3(2): 256–68. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429>.
- Sugiyono. 2022. *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D.* ed. Alfabet. Bandung.
- Sujarweni. 2015. *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi.* ed. pt pustaka Baru. yogyakarta.
- Sulistyowati, dan Fidiana. 2017. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6(1): 121–37. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/670>.
- Sumatera Selatan, Tim UJDIH BPK Perwakilan. 2021. “Refocusing Dan Realokasi Anggaran Terkait Penanganan Covid-19 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.” 3: 103–11.

<https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Refocusing-dan-Realokasi-Anggaran-Terkait-Penanganan-Covid-19-di-Pemprov-Sumsel.pdf>.

Tamawiwiy, Julius, Sondakh; Jullie J, dan Warongan; Jessy D.L. 2016. "PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 7(2): 103–24.

Tamawiwiy, Julius, Jullie J Sondakh, dan Jessy D.L Warongan. 2016. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik." *Jurnal EMBxA* 1(4): 78–85.

Wahyuni, Endang Sri, dan Rosmida. 2016. "Analisis Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah." *Jurnal Inovasi dan Bisnis* 4(4): 103–12.

Yanto, Joni Kristian Firdi, dan Susi Astuti. 2020. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 2(3): 346–57.